

**UPAYA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
MERANTI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN
TEBING TINGGI TAHUN 2020**

Oleh : Nur Fatihah

Pembimbing: Adlin, S.Sos., M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

One of the authorities given to the Regional Government is waste management. The waste problem is a problem that is always hotly discussed in Indonesia and in cities around the world, because almost all districts and cities in Indonesia face this waste problem, as is the case in the Meranti Islands Regency, Riau Province. This research will describe the government's efforts to deal with waste in Tebing Tinggi District in 2020, and the research method used in this research is qualitative. The results of the research show that to date the efforts made by the Meranti Islands Regency government in dealing with the waste problem in 2020 have not been optimal due to very limited dam factors when compared with other districts or cities in the Riau Province region. Efforts made regarding waste handling and management are of course ineffective because there is a reduction in funding from the regional government. However, the department that carries out waste management continues to strive to provide the best.

Keywords: *Government Efforts, Waste Management, Handling*

PENDAHULUAN

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada prinsipnya mengubah sistem penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sehingga daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pelayanan, pemberdayaan, dan peran masyarakat. Pemerintahan Daerah

adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana yang di atur dalam Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintah wajib dan

urusan pemerintah pilihan. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan bukan pelayanan dasar salah satu sub urusannya yaitu persampahan.

Tuntutan perubahan sering ditunjukkan kepada aparat pemerintah menyangkut pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat, suatu hal yang hingga saat ini sering kali masih menjadi masalah dalam hubungan antara pemerintah dan rakyat. Hal itu terutama dalam hal kualitas atau mutu pelayanan aparat pemerintah kepada masyarakat. Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 maka Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri (Syafiie, 2013).

Salah satu wewenang yang diberikan kepada Pemerintah Daerah adalah urusan pengelolaan sampah. Masalah sampah merupakan masalah yang selalu hangat dibicarakan di Indonesia maupun di kota-kota dunia, karena hampir semua kabupaten maupun kota di Indonesia menghadapi masalah permasalahan sampah tersebut, seperti yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Masalah sampah yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan masalah yang sudah terjadi selama bertahun-tahun kebiasaan buruk masyarakat dalam membuang sampah terkadang tidak memperdulikan akibat dari pembuangan sampah yang nantinya akan berakibat kemasyarakatan itu sendiri.

Sampah merupakan konsekuensi dari adanya aktifitas masyarakat. Setiap aktivitas manusia pasti menghasilkan sampah. Seiring dengan tumbuhnya sebuah kota, bertambah pula beban yang harus diterima kota tersebut. Salah satunya adalah beban akibat dari sampah yang di produksi oleh masyarakat perkotaan secara kolektif. Untuk kota-kota besar, sampah akan memberikan berbagai dampak negative yang sangat besar apabila penanganannya tidak dilakukan secara cermat dan serius yaitu mengakibatkan terjadinya perubahan keseimbangan lingkungan yang merugikan atau tidak diharapkan sehingga dapat mencemari lingkungan baik terhadap tanah, air, dan udara. Pengelolaan sampah secara efektif dan efisien harus dijalankan oleh semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah. Semua pihak ini bertanggungjawab terhadap penanganan sampah sehingga tidak lagi menimbulkan masalah.

Masalah sampah merupakan masalah yang selalu hangat dibicarakan di Indonesia maupun dikota-kota dunia. Karena hampir semua kota daerah menghadapi masalah yang sudah terjadi selama bertahun-tahun kebiasaan buruk masyarakat dalam membuang sampah terkadang tidak memperdulikan akibat dari pembuangan sampah yang nantinya akan berakibat kemasyarakatan itu sendiri. Adapun data distribusi pengelolaan sampah tahun 2020 dikabupaten Kepulauan Meranti dapat di lihat dari table berikut :

Tabel 1.1
Distribusi Pengelolaan Sampah Di
Kecamatan Tebing Tinggi
Kabupaten Kepulauan Meranti
Tahun 2020

No	Komponen	Volume Sampah (m ³)
1	Organik	73.00
2	Kertas	14.63
3	Kaca	2.00
4	Plastik	11.38
5	Daun dan Kayu	1.00
6	Lain-lain	4.00
Jumlah		106.01

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Pertahanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti, 2020

Tabel 1.1 diatas menunjukkan jumlah sampah yang berasal dari masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti sepanjang tahun 2020. Berdasarkan data dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Pertahanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti, jumlah sampah terbesar berasal dari kategori sampah organik yaitu sebesar 74 m³ atau sebesar 83,96%, adapun yang termasuk kedalam kategori sampah organik seperti kertas, daun, kayu dan jenis sampah lainnya yang berasal dari alam dan dapat membaaur dengan tanah, sedangkan sisanya yaitu sebesar 16,04% berasal dari kategori sampah non organik, seperti plastik, kaca dan jenis sampah lainnya yang berasal dari bahan

kimia dan tidak dapat membaaur dengan tanah.

Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah di uraikan dalam latar belakang masalah maka ada beberapa rumusan masalah yang akan di teliti adalah Bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam menangani permasalahan sampah di Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2020?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan latar belakang dari perumusan masalah adalah untuk mengetahui upaya pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam menangani permasalahan sampah di Di Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2020.

Kerangka Teori

1. Pemerintah

Pemerintahan dalam arti luas yang disebut *regering* atau *government*, yakni pelaksanaan tugas seluruh badan-badan, lembaga-lembaga dan petugas-petugas yang disertai wewenang mencapai tujuan negara. Arti pemerintahan meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudisiil atau alat-alat kelengkapan negara yang lain yang juga bertindak untuk dan atas nama negara. Philipus M. Hadjon memberikan pendapatnya mengenai Pemerintahan sebagai berikut Syafie (2013):

“Pemerintahan dapat dipahami melalui dua pengertian: di satu pihak dalam arti “fungsi pemerintahan” (kegiatan memerintah), di lain pihak dalam arti “organisasi pemerintahan”

(kumpulan dari kesatuan-kesatuan pemerintahan). Fungsi pemerintahan ini secara keseluruhan terdiri dari berbagai macam tindakan-tindakan pemerintahan: keputusan-keputusan, ketetapan-ketetapan yang bersifat umum, tindakan-tindakan hukum perdata dan tindakan-tindakan nyata. Hanya perundang-undangan dari penguasa politik dan peradilan oleh para hakim tidak termasuk di dalamnya”.

Lahirnya pemerintahan pada awalnya adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam masyarakat, sehingga masyarakat tersebut bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan meningkatnya kebutuhan, peran pemerintah berubah menjadi melayani masyarakat. Pemerintah modern, dengan kata lain pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetap untuk melayani diri sendiri, tetap untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi memungkinkan setiap anggota mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama (Syafiie, 2013).

Dengan demikian lahirnya pemerintahan memberikan pemahaman bahwa kehadiran suatu pemerintahan merupakan minifestasi dari kehendak masyarakat yang bertujuan untuk berbuat baik bagi kepentingan masyarakat, bahkan Van Poelje (dalam Syafiie, 2013 : 52) menegaskan bahwa pemerintahan dapat dipandang sebagai suatu ilmu yaitu mengajar bagaimana cara

terbaik dalam mengarahkan dan memimpin pelayanan umum.

Uraian tersebut menjelaskan juga bahwa suatu pemerintahan hadir kerna adanya suatu komitmen bersama yang terjadi antara pemerintah dengan rakyatnya sebagai pihak yang diperoleh dalam suatu posisi dan peran, yang mana komitmen tersebut hanya dapat dipegang apabila rakyat dapat merasa bahwa pemerintah itu memang diperlakukan untuk melindungi, memperdayaan dan mensejahterakan rakyat. Dengan demikian lahirnya pemerintahan memberikan pemahaman bahwa kehadiran suatu pemerintahan merupakan manifestasi dari kehendak masyarakat yang bertujuan untuk berbuat baik bagi kepentingan masyarakat. Defenisi ini menggambarkan bahwa pemerintahan sebagai suatu ilmu mencakup 2 (dua) unsur utama yaitu: pertama, masalah bagaimana sebaiknya pelayanan umum dikelola, jadi termasuk seluruh permasalahan pelayanan umum, dilihat dan dimengerti dari sudut kemanusiaan; kedua, masalah bagaimana sebaiknya memimpin pelayanan umum, jadi tidak hanya mencakup masalah pendekatan yaitu bagaimana sebaiknya mendekati masyarakat oleh para pengurus, dengan pendekatan terbaik, masalah hubungan antara birokrasi dengan masyarakat, masalah keterbukaan juga keterbukaan yang aktif dalam hubungan masyarakat, permasalahan psikologi sosial dan sebagainya.

B. Pemerintah Daerah

Reformasi pemerintahan yang terjadi di Indonesia, saat ini telah mengakibatkan pula terjadinya

pergeseran paradigma dari sentralistik ke arah desentralisasi, yang ditandai dengan pemberian otonomi kepada daerah. dan ada juga koordinasi pemerintahan tentunya menghadapi tantangan yang besar, yang disebabkan oleh masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaannya, yang dimaksud dengan masalah koordinasi dapat disebutkan bahwa masalah perihal kerja sama antara aparatur pemerintahan dan pertaliannya satu sama lain. Koordinasi pemerintahan menjadi faktor dominan ketidakberhasilan pemerintah dalam menjalankan fungsi pembangunan, fungsi pelayanan, dan fungsi pemberdayaan (Syafiie, 2013). Pengalaman dari banyak negara mengungkapkan bahwa pemberian otonomi kepada daerah-daerah merupakan salah satu resep politik penting untuk mencapai sebuah stabilitas sistem dan sekaligus membuka kemungkinan bagi proses demokratisasi yang pada gilirannya nanti akan semakin mengukuhkan stabilitas sistem secara keseluruhan. Pelaksanaan desentralisasi dengan pemberian otonomi kepada daerah tidak demikian mudahnya memenuhi keinginan daerah bahwa dengan otonomi daerah segalanya akan berjalan lancar dan mulus. Keberhasilan otonomi daerah sangat bergantung pada pemerintah daerah dalam hal ini adalah DPRD dan Kepala Daerah, serta Perangkat Daerah lainnya. Dengan demikian, perlu adanya hubungan yang harmonis antara DPRD dan Kepala Daerah. Dan ada juga *Collaborative Governance* itu juga sangat penting diterapkan dalam konsep pemerintahan, *Collaborative*

Governance sebagai pembangunan kawasan perdesaan dinilai akan mampu memaksimalkan potensi keterlibatan berbagai pihak dalam pembangunan kawasan perdesaan (Syafiie, 2013).

Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam pembinaan dan pengawasan di daerahnya. Karena dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Bab 1 tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 5 menyebutkan urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian Negara dan penyelenggara pemerintan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

C. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah tidak hanya menyangkut aspek teknis semata, namun yang jauh lebih penting adalah menyangkut masalah pengetahuan dalam rangka mendorong perubahan sikap dan pola pikir menuju terwujudnya masyarakat yang rama lingkungan dan berkelanjutan (Suryani, 2017). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 Ayat (2) mendefinisikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan

penegakan hukum. Tujuan umum lingkungan hidup adalah terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Konsep dasar pengelolaan sampah merupakan suatu upaya untuk mencegah terjadinya penumpukan sampah, dan menekankan dampak negatif yang mungkin terjadi, serta bagaimana pemanfaatannya (Sahil, dkk, 2016). Bertolak dari konsep dasar tersebut, para ahli melakukan pengkajian, baik secara teoritis maupun secara empirik. Kajian akademik mengenai pengelolaan sampah dilakukan oleh para ahli lingkungan dan kelompok pencinta lingkungan. Dari sedikit gambaran mengenai sampah tersebut, kita dapat menelaah dan membuat suatu rangkaian proses bagaimana sampah yang dihasilkan dapat dikelola menjadi sampah yang lebih ramah lingkungan dan bahkan dimanfaatkan lagi untuk kegunaan yang lain.

Selain poin-poin penting dalam pengelolaan sampah dan rangkaian pembuangan sampah yang ideal diatas, berdasarkan UU no 40 ayat yang harus dilakukan dalam rangka pengelolaan sampah yang ideal adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan target pengurangan sampah secara berkesinambungan terhadap timbulan sampah dalam jangka waktu tertentu
2. Memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan
3. Memfasilitasi penerapan produk yang ramah lingkungan

4. Memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang
5. Memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang

METODE PENELITIAN

Adapun jenis data yang terkumpul, akan dianalisis melalui tahap pertama yakni pengumpulan data berupa hasil wawancara, observasi serta dokumentasi di lapangan secara obyektif kemudian tahap kedua yakni reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal - hal yang penting dicari tema dan polanya. Selanjutnya tahap ketiga yakni tahap penyajian data yakni sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, dan tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dengan usaha untuk mencari, menguji, atau mengecek kembali atau memahami makna. Penggunaan metode ini bertujuan untuk mengukur secara cermat pelaksanaan strategi Pemerintah Daerah dalam menangani permasalahan sampah di Kabupaten Kepulauan Meranti dengan menggunakan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBEHASAN

Dalam bab ini akan disajikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai upaya pemerintah daerah Kabupaten Meranti dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Tebing Tinggi tahun 2020. Penelitian ini berfokus pada kegiatan pengelolaan sampah yang berlokasi di Kabupaten Kepulauan Meranti untuk membantu pemerintah

kabupaten dalam mewujudkan kabupaten yang bersih dan nyaman.

Dalam konsep upaya pengelolaan sampah, terdapat beberapa pendapat ahli terkait seperti yang diungkapkan oleh Usman (2016) yang menyebutkan bahwa upaya yang digunakan dalam pengelolaan limbah elektronik melalui pengembangan infrastruktur ramah lingkungan diketahui bahwa strategi prioritas yang harus dilakukan saat ini adalah mengembangkan infrastruktur pengelolaan limbah elektronik ramah lingkungan sehingga sistem pengolahan dan daur ulang dapat berjalan dengan skema ramah lingkungan.

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Dewi Atmidilla, S.T, M.M selaku Kepala Bidang Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Pertahanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti menyatakan bahwa:

“Sesuai dengan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 97 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga bahwa target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Kepulauan Meranti dari tahun 2018 s.d. 2025 yang disesuaikan dengan Kebijakan dan Strategi Nasional mengalami kenaikan persentase dari 18% hingga 30%”. (Wawancara pada

tanggal 13 Mei 2023, Pukul 10.35 WIB)

Melalui hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 97 Tahun 2022 yang mengubah Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, terdapat peningkatan target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Kepulauan Meranti dari tahun 2018 hingga 2025. Penyesuaian ini dilakukan sesuai dengan Kebijakan dan Strategi Nasional.

Adapun peningkatan persentase target tersebut mencapai 30%, meningkat dari 18% pada tahun 2018. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan upaya pengelolaan sampah dengan fokus pada pengurangan sampah rumah tangga dan jenis serupa. Dengan demikian, langkah-langkah yang diambil sejalan dengan arah nasional dalam mengatasi permasalahan sampah dan mendukung keberlanjutan lingkungan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

PENUTUP KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya pengelolaan sampah di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti

tahun 2020 belum optimal, hal ini dapat dilihat dari Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2020 Peraturan Perda Nomor 2 tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti belum bisa menetapkan target pengurangan sampah secara berkesinambungan terhadap timbulan sampah dalam jangka waktu tertentu. Pemerintah juga sangat minim sekali dalam memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan; Memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan; Memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan Memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pendanaan dan focus pemerintah setempat terhadap pengelolaan sampah di Kecamatan Tebing Tinggi.

2. Adapun faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pengelolaan sampah kemampuan organisasi yang masih belum memadai, kurangnya informasi yang diberikan kepada masyarakat, minimnya dukungan anggaran dan pembagian potensi yang belum berjalan optimal.

Saran

Untuk meningkatkan upaya pelaksanaan pengelolaan sampah di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti, maka ada beberapa hal yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti

termasuk masyarakat diantaranya sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam hal ini Dinas Kepulauan Meranti harus segera melakukan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah dengan mengedepankan prinsip 4R, sehingga sampah dapat dikelola menjadi barang yang bermanfaat, sekaligus meningkatkan pendapatan warga dan diharapkan menambah sarana prasarana yang kurang agar dapat menunjang kebutuhan dalam pengelolaan sampah, Serta diharapkan secepatnya pembangunan TPS dan TPA di Kabupaten Kepulauan Meranti khususnya di Kecamatan Tebing Tinggi agar meminimalisir tumpukan sampah yang ada.
2. Disarankan kepada masyarakat agar menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, selalu berperilaku hidup bersih terhadap lingkungan agar bebas dari sampah dan selalu menjaga kestabilan lingkungan, serta memahami bahwasannya tugas mengelola kebersihan lingkungan tidak hanya

- tugas Pemerintah Daerah khususnya Dinas Lingkungan Hidup tetapi juga harus ada peran dan partisipasi dari masyarakat.
3. Disarankan kepada pengurus Bank Sampah diharapkan melakukan sosialisasi aktif kepada masyarakat agar dalam kegiatan masyarakat yang ikut terus meningkat dan bisa menambah nasabah Bank Sampah secara menyeluruh, agar seluruh masyarakat di Kecamatan Tebing Tinggi bisa mengelola sampah dengan baik dan benar. Kemudian bagi pengurus Bank Sampah hendaknya lebih giat dan paham dalam mengelola sampah sehingga ketika mengurus mengadakan training kepada masyarakat, pengurus dapat mempengaruhi dan menarik masyarakat untuk menjadi nasabah Bank Sampah di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.
- Perilaku Pedagang dalam Membuang Sampah di Pasar Sentral Sekura. (Online). Vol. 2 No.2.
- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti. (2019). Data Jumlah Sampah di Pasar Modern Selat Panjang. Selat Panjang: DLHK. Dobiki, J. (2018). Analisis Ketersediaan Prasarana Persampahan di Pulau Kumodan Pulau Kakara di Kabupaten Halmahera Utara. (Online). Jurnal Spasial Vol. 5 No. 2. ISSN 2442-3262.
- Dwiyanto, Agus. 2011. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta. Gajah Mada University Press
- Hardiansyah. 2011. *kualitas pelayanan publik (konsep, dimensi indikator implementasi)*. Yogyakarta: Gava media.
- La Oda Syaiful Islamy. 2018. *Collaborative Governance Konsep dan Aplikasi*. CV Budi Utama.
- Moleong, L. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi) (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nurdin ismail, Sri hartati. 2019. *metode penelitian sosial*. Surabaya: Media sahabat Cendikia.
- Rahayu, amy, Vishnu Juwono. 2019. *Birokrasi dan Governance*. Depok: Rajawali Pers.
- Syam, D.M. (2016). Hubungan Pengetahuan dan Sikap Masyarakat dengan

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Chris Ansell and Alison Gash. 2007. *Collaborative Governanance in Theory and Practice*, Berkeley: University of California
- Damayanti, R. (2016). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan

- Perilaku Pedagang dalam Membuang Sampah di Pasar Sentral Sekura. (Online). Vol. 2 No.2.
- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti. (2019). Data Jumlah Sampah di Pasar Modern Selat Panjang. Selat Panjang: DLHK. Dobiki, J. (2018). Analisis Ketersediaan Prasarana Persampahan di Pulau Kumodan Pulau Kakara di Kabupaten Halmahera Utara. (Online). Jurnal Spasial Vol. 5 No. 2. ISSN 2442-3262.
- Dwiyanto, Agus. 2011. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta. Gajah Mada University Press
- Hardiansyah. 2011. *kualitas pelayanan publik (konsep, dimensi indikator implementasi)*. Yogyakarta: Gava media.
- La Oda Syaiful Islamy. 2018. *Collaborative Governance Konsep dan Aplikasi*. CV Budi Utama.
- Moleong, L. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi) (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nurdin ismail, Sri hartati. 2019. *metode penelitian sosial*. Surabaya: Media sahabat Cendikia.
- Rahayu, amy, Vishnu Juwono. 2019. *Birokrasi dan Governance*. Depok: Rajawali Pers.
- Syam, D.M. (2016). Hubungan Pengetahuan dan Sikap Masyarakat dengan

Pengelolaan Sampah di
Desa Loli Tasiburi
Kecamatan Banawa
Kabupaten Donggala.
(Online). Jurnal Higiene
Vol 2. No.1. ISSN 2443-
1141.

- Subarsono, Agustinus. 2016.
*kebijakan publik dan
pemerintah kolaboratif isu-
isu konteporer.*
Yogyakarta: Gava media.
- Silalahi, Ulber. 2010. *Metode
Penelitian Sosial.* Bandung:
PT. Rafika Aditama
- Yulianto, B. (2016). Partisipasi
Pedagang Dalam
Melaksanakan Pemilahan
Sampah di Pasar Baru
Kecamatan Tampan Kota
Pekanbaru. (Online). Jurnal
Kesehatan Komunitas, Vol
3, No. 2.
- Zulkarnain, SZ (2009). Faktor-faktor
penentu tingkat partisipasi
pedagang dalam
pengelolaan sampah di
Pasar Pagi Arengka Kota
Pekanbaru. (Online),